

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata efektif mempunyai arti pengaruh akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan daya guna adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dan menurut Steers dalam Siswanto (2015) efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*) berbanding masukan (*input*). Selanjutnya efektivitas (*effectiveness*) menurut Kisdarto (2012 :429) merupakan berkenanan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akurat) yang diharapkan, atau dicapai tujuan dari tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan. Lebih lanjut efektivitas disebutkan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Yang mengartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya (Sumaryadi, 2013:105).

Pengertian efektivitas menurut Smith (2016) efektivitas adalah penggunaan sumber aktivitas yang diperuntukkan untuk memperoleh hasil. Inilah yang biasa disebut teori efektivitas yaitu penggunaan semua aktivitas untuk mendapatkan hasil sesuai dengan aktivitas penggunaan. untuk menghasilkan yang maksimal (*maximalization yield*) sesuai dengan penggunaa. berdasarkan uraian diatas bahwa efektifitas merupakan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara komprehensif efektifitas merupakan kemampuan tingkat suatu organisasi atau lembaga untuk bisa menjalankan semua tugas-tugas pokok dengan sesuai sasaran yang telah tetepakan sebelumnya.

Efektifitas sering di hubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi .padahal tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif tetapi belum bisa di katakan efisien.Walaupun adanya peningkatan efektifitas dalam suatu organisasi maka belum tentu efisien. Jika tujuan atau sasaran telah tercapai dengan yang rencanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif.sehingga bila suatu perkerjaan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ,maka dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Campbell (2016), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Menurut Gibson (2012:199) menyatakan pula bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga tahapan (waktu) yakni : (1) jangka pendek yang mencakup produksi (*productive*), Efisiensi (*efficiency*), kepuasan (*satisfaction*); (2) jangka menengah, mencakup: adaptasi (*adaptiveness*), pengembangan (*devolement*);(3) jangka panjang adalah *survive* (hidup terus), organisasi harus menginventasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya bertahan hidup/hidup terus dalam jangka panjang. apabila peningkatan dikaitkan dengan fungsi organisasi maka upaya peningkatan dapat dikatakan efektif atau tepat sasaran, tepat tujuan dan berhasil guna jika sasaran atau tujuan direncanakan ingin dicapai dapat berhasil sesuai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan sifat organisasi cenderung merupakan kesatuan kompleks, yang berusaha mengalokasikan sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Semakin rasional organisasi makin besar upaya pada kegiatan yang mengarah pada tujuan.

Thoha(2012:9), menyatakan efektivitas adalah “hubungan antara output dan tujuan”. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian teoritis dan praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Berbagai pandangan yang di

kemukakan para ahli berbeda-beda tentang pengertian dan konsep efektivitas dipengaruhi oleh latar belakang dari keahlian yang berbeda pula.

2.1.2. Teori Efektifitas

Adapun untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada 3 pendekatan yang digunakan seperti yang dikemukakan oleh Silalahi (2017). Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan Efektifitas sebagai berikut.

1. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran atau pencapaian tujuan (*goal attainment approach*) yang bahwa keefektifkan sebuah organisasi harus di nilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*) ketimbang caranya (*means*). Dalam konteks inilah keefektifkan organisasional didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mewujudkan tujuannya. Jadi *goal approach* fokus pada keluaran produk dari organisasi. ringkasan dalam pendekatan ini untuk mengidentifikasikan sasaran organisasi dan menilai seberapa baik organisasi telah mencapai tujuan ini. dimana pendekatan ini untuk mencapai tingkat output keuntungan, atau kepuasan klien tertentu. pendekatan ini mengukur kemajuan menuju pencapaian sasaran. Sehingga Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu program berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. efektivitas dalam pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak di capai. Dimana dalam keadaan

yang terjadi merupakan pada sasaran yang tercapai kepada suatu tujuan untuk memberikan suatu keberhasilan.

Dalam merealisasikan pupuk bersubsidi di Desa Labai Mandiri Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi karena pada kenyataannya masih ada penyimpangan dalam merealisasikan pupuk bersubsidi dari hasil lapangan ditemukan pembeli yang tidak terdaftar RDKK bisa membeli pupuk Bersubsidi Untuk kebutuhan pribadi .maka diperlukan pendekatan sasaran atau pendekatan tujuan untuk membantu dalam merealisasikan pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran untuk mencegah kecurangan tersebut perlu pengawasan yang transparan dan kerja sama yang baik terhadap kelompok petani.

2. Pendekatan sumber (*system resource approach*)

Pendekatan sistem (*system approach*) bahwa menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan, melakukan proses transformasi dan menghasilkan keluaran (output).oleh karena itu menetapkan keefektifan organisasionalnya atas dasar hasil pencapaian tujuan ,pendekatan ini merupakan kriteria yang tidak sempurna meskipun tujuan akhir tidak diabaikan.keefektifan masukan,memproses masukan tersebut,menyalurkan keluarannya. Dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan. Yang merupakan cara lain untuk mengukur keefektifan organisasi, sehubungan dengan hal ini berkembang the input (*system resource approach*) lebih fokus pada observasi masukan ke organisasi dimana pendekatan melihat sisi masukan dari proses transformasi mengukur Efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya suatu lembaga harus dapat

memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya. Karena lembaga merupakan mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan yang diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pada pendekatan ini perlu kerja sama dinas pertanian dalam pengolahan data yang akurat sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan untuk menetralkan kecurangan dalam pengolahan data maka Dinas pertanian kabupaten Melawi perlu kerja sama dari Dinas pertanian Provinsi dan pengawasan pupuk bersubsidi karena dasarnya kecurangan yang terjadi dari laporan yang diterima oleh dinas pertanian kabupaten Melawi harus sesuai dengan kenyataan di lapangan yang diterima petani maka supaya tidak terjadi kecurangan dalam pengolahan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan sumber data yang perlu kerja sama dinas pertanian terhadap dinas pertanian provinsi kelompok petani dan pengawasan pupuk bersubsidi karena dasarnya data yang digunakan terkadang data yang tidak akurat memperoleh menetralkan kecurangan dalam memberikan harga pupuk sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).

3. Pendekatan proses (*Internal process approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, memiliki proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan

memutuskan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang di miliki oleh lembaga ,yang menggambarkan tingkat efisiensi kesehatan lembaga . dimana dalam pendekatan ini dinas pertanian Kabupaten Melawi apakah sudah terkoordinasi dengan baik dalam pembagian pupuk bersudisi kepada setiap kelompok petani sehingga dapat melihat hasil dari proses yang dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Melawi sudah sesuai dengan SOP kerja untuk mengukur kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Melawi.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah selalu berupaya mendorong petani untuk memanfaatkan pupuk secara tepat waktu dan tepat dosis. Konsekuensinya adalah pemerintah juga harus berupaya meningkatkan produksi pupuk, sehingga tercapai pasokan yang cukup dan juga dengan harga yang dapat dijangkau oleh petani. agar harga pupuk terjangkau oleh petani, maka pemerintah juga menetapkan HET (*celling price*) terhadap harga jual pupuk. Dengan adanya subsidi input ini maka biaya produksi padi akan berkurang, sehingga produksi meningkat. Namun tidak bisa dihindari hilangnya efisiensi ekonomi karena uang untuk subsidi tersebut dialokasikan. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

Efektivitas penggunaan Penggunaan suatu potensi sumber daya yang efektif, bila setiap aktivitas tersebut mendapatkan hasil. Penggunaan berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan pertimbangan:

- (1) Memberikan manfaat sesuai jenis kegiatan.
- (2) Memberikan manfaat sesuai jumlah kegiatan yang dilakukan.
- (3) Mempunyai manfaat sesuai dengan nilai guna dan
- (4) Penggunaan waktu yang digunakan.

Semakin banyak potensi sumber daya yang digunakan, maka semakin memberi kontribusi pencapaian hasil yang besar secara efektif. Jadi efektivitas penggunaan selalu mempertimbangkan jenis, jumlah, nilai dan waktu yang digunakan untuk menggunakan potensi sumber daya secara efektif. Itulah sebabnya efektivitas penggunaan selalu berorientasi kepada pengoptimalan manfaat untuk mendapatkan hasil maksimal. Seperti halnya efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi harus berorientasi kepada penggunaan pupuk kepada petani yang tersalurkan dengan baik sesuai dengan penggunaan jenis pupuk yang digunakan, umlah pupuk yang dibutuhkan, harga pupuk yang terjangkau dan ketepatan waktu pendistribusian yang digunakan oleh petani dalam menentukan tingkat efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Petani selalu mempertimbangkan efektivitas penyaluran pupuk secara optimal untuk mendapatkan hasil maksimal.

2.1.3. Pengertian Penyaluran (Distribusi)

Kotler (2008) penyaluran (distribusi) secara umum merupakan istilah yang banyak digunakan dalam aktivitas pemasaran. Terdapat tiga kelompok aktivitas yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi (penyaluran). Aktivitas yang terakhir yaitu

Distribusi adalah “kegiatan yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.”

Keterkaitan ketiga hal tersebut memberikan dua aspek penting yang terlibat didalamnya, yaitu

- Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution* atau *marketing channel*).
- Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).

Kotler(2008) mengemukakan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan didalam memilih saluran distribusi, faktor tersebut antara lain: (1) Jenis barang yang dipasarkan, (2) Produsennya. (3) Penyalur yang bersedia ikut mengambil bagian, (4) Pasar sasaran. Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat.

Agen perantara (*agent middle man*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang ditangani, dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu pertama agen penunjang terdiri atas agen pembelian dan penjualan, agen pengangkutan dan agen penyimpanan. Dan kedua, agen pelengkap yaitu agen yang membantu dalam bidang finansial, bidang keputusan, memberikan informasi dan agen khusus.

Swastha (2016) terdapat tiga fungsi saluran distribusi yaitu fungsi pertukaran, penyediaan fisik dan penunjang. Dalam masing-masing fungsi saluran distribusi diatas diperlukan adanya transaksi antara dua pihak atau lebih, menyangkut pemindahan barang-barang secara fisik dari produsen sampai kepada konsumen, serta bersifat membantu untuk pelaksanaan fungsifungsi lainnya. Ketiga fungsi saluran tersebut harus saling mendukung demi kelancaran proses saluran pendistribusian barang dalam perusahaan

Dibawah ini digambarkan beberapa tipe saluran untuk barang konsumen dan barang industri. (Kotler, 2008)

a. Tipe saluran untuk barang konsumen

Saluran 1 : ProdusenKonsumen

Saluran 2 : ProdusenPedagang eceranKonsumen

Saluran 3 : ProdusenGrosirPedagang eceranKonsumen

Saluran 4 : ProdusenAgenGrosirPedagang eceranKonsumen

b. Tipe saluran untuk barang industri

Saluran 1 : ProdusenPemakai industri

Saluran 2 : Produsen Distributor industriPemakai industri

Saluran 3 : ProdusenAgenDistributor industriPemakai industri

Saluran 4 : ProdusenAgenPemakai industri

Secara terperinci, kegiatan yang ada dalam kegiatan distribusi fisik dapat dibagi menjadi beberapa macam Menurut Basu Swasta yaitu:

1. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanannya, kebijaksanaan terhadap lokasi persediaan didasarkan pada strategi yang diinginkan. Jika perusahaan mengkonsentrasikan persediaannya, maka akan memudahkan dalam mengadakan pengawasan. Penyimpanan erat kaitannya dengan pergudangan, biasanya perusahaan yang tidak mempunyai fasilitas penyimpan sendiri umumnya menyewa kepada lembaga atau perusahaan lain atau disebut gudang umum. Besarnya sewa yang harus dibayar ditentukan menurut besarnya ruangan yang digunakan.

2. Sistem penanganan barang Sistem penanganan barang yang dapat digunakan antara lain:

- Dalam penanganan barang-barang baik itu berupa bahan baku maupun barang jadi dipakai suatu alat yang disebut palet.
- Pengemasan barang-barang yang ditangani ditempatkan dalam suatu kemasan atau petikemas baik dari logam, kayu, ataupun bahan yang lain.

- Sistem pengawasan persediaan Faktor penting yang lain dalam sistem distribusi fisik adalah mengadakan pengawasan secara efektif terhadap komposisi dan besarnya persediaan.

3. Adapun tujuan dari pengawasan persediaan adalah meminimumkan jumlah persediaan yang diperlukan, dan meminimumkan fluktuasi dalam persediaan sambil melayani pesanan dari pembeli. Besarnya persediaan sangat ditentukan oleh keseimbangan kebutuhan pasar dengan faktor biaya. Prosedur memproses pesanan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memproses pesanan dari produsen kepada konsumen. Pemilihan metode pengangkutan dalam hal ini, rute dan rit pengangkutan merupakan faktor yang penting, dan mempunyai hubungan yang erat dengan pasar atau daerah penjualan, serta lokasi persediaannya. Selain itu, fasilitas pengangkutan yang ada juga merupakan faktor penentu.

Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian sehingga Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di Lini IV kepada petani atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor01/KPTS/RC.210/B/2021 dimana penyaluran pupuk kepada petani/kelompoktani dilakukan dengan pola tertutup menggunakan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Alokasi Pupuk Bersubsidi Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/Per/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK.

- HET Pupuk Bersubsidi Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 tahun 2021, sebagai berikut: HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kartu Tani berbasis e-RDKK Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan

menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani. Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

2. Penerbitan dan distribusi Kartu Tani Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi. Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut: Penebusan Menggunakan.

Gambar 2.4

Mekanisme pendataan kartu tani



sumber: www.dinaspertanian2021.com

Penebusan Menggunakan Kartu Tani Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut:

- 1) Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi
- 2) Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukan PIN sebagai dasar transaksi
- 3) Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan menyetorkan dana tersebut pada rekening Kartu Tani selanjutnya digunakan untuk transaksi pupuk bersubsidi
- 4) Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut
- 6) Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti print out transaksi error untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.

2.1.1. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk

Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang

ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian Ditjen PSP dengan PT Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian, karena pada tahun berjalan belum dapat ditetapkan HPPnya karena auditor umumnya baru dapat menyampaikan hasil pemeriksaan pada tahun berikutnya. Adapun pembayaran secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada PMK No 68 Tahun 2016, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan diharapkan lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka pikir dalam penelitian ini, antara lain :

2.2.1. Nurhayati. 2016. “Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Padi Sawah Di Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan”.

Penelitian Nurhayati yang berjudul “ Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Padi Sawah Di Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan”. Pada tahun 2016 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme perolehan pupuk bersubsidi pada petani padi sawah di Desa Rawang Lama dan untuk menganalisis efektivitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi sawah di Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten

Asahan. Penelitian ini di laksanakan di Desa Rawang Lama, Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan pupuk subsidi secara keseluruhan dari segi Tepat Tempat, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Jumlah di Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan sudah efektif. Persamaan dari peneliti yang penulis telusuri mengenai perolehan pupuk subsidi secara dari segi Tepat Tempat, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Jumlah dimana efektifitas nya merupakan untuk menganalisis tentang penyaluran pupuk bersubsidi sedangkan dalam perbedaan penulis merupakan lokasi penelitian dan teori yang digunakan Menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. sedangkan penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martini dan Lubis yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses.

2.2.2. Valeriana Darwis dan Supriyati. 2013 “Subsidi Pupuk : Kebijakan , Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya.”

Penelitian yang dilakukan oleh Valeriana Darwis dan Supriyati yang diterbitkan dalam artikel yang berjudul “Subsidi Pupuk : Kebijakan , Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya.” pada tahun 2013 yang bertujuan untuk Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam

pelaksanaannya kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti: pengalokasian pupuk (kuota) ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, titik bagi terakhir berada di kelompok tani (lini v), penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang semestinya dan pengalokasian dana yang cukup serta penetapan petugas yang tetap untuk operasional petugas PPNS dan KP3. Dalam perasaman penulis yaitu tentang penelitian bahwa Dalam pelaksanaannya kebijakan subsidi pupuk bersubsidi belum optimal. Sedangkan untuk perbedaannya merupakan kebijakan yang pada tahun 2013 yang bertujuan untuk Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk.

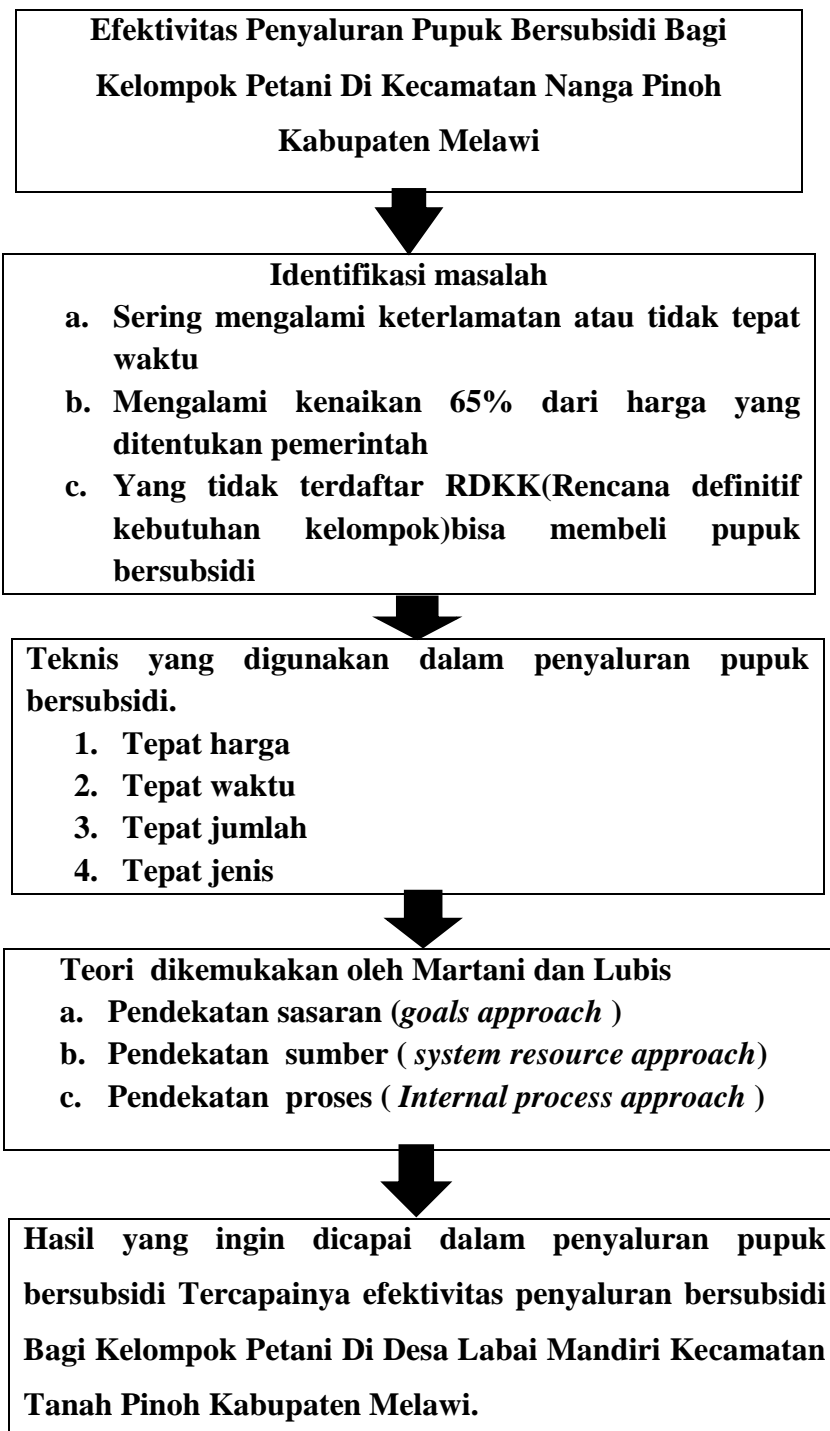
2.3 Kerangka Pikir

Pupuk merupakan suatu kebutuhan faktor utama selain lahan, untuk memenuhi kebutuhan petani. Pupuk digunakan untuk meningkatkan produksi gabah petani sehingga kebutuhan pupuk sangat berpengaruh dalam menunjang petani. Untuk itu fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi untuk petani diadakan guna meningkatkan produksi, pendapatan dan memperoleh hasil pertanian yang optimal. Subsidi pupuk dapat diartikan sebagai alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi harga pupuk yang dimana perlu pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi supaya tidak terjadinya penyimpangan atau disalahgunakan maka dari itu perlunya mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan acuan bagi petugas pelaksanaan kegiatan.

Kerangka pikir tentang efektivitas program penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. Teknis pelaksanaan mengacu kepada empat prinsip yaitu: (1) tepat jenis (2) tepat jumlah (3) tepat harga dan (4) tepat waktu untuk mewujudkan efektivitas program penyaluran pupuk bersubsidi. Acuan teori yang digunakan adalah teori efektivitas. Teori efektivitas yaitu penggunaan sumber aktivitas yang diperuntukkan untuk memperoleh hasil. lebih jelasnya ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

GAMBAR 2.4

Kerangka Pikir



2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan permasalahan.

- a. Bagaimana efektifitas pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Labai Mandiri dilihat dari pendekatan sasaran, ?
- b. Bagaimana efektifitas pelaksanaan di Dinas Pertanian Kabupaten Melawi dilihat dari pendekatan sumber,dan pendekatan proses ?
- c. Bagaimana efektifitas untuk mewujudkan tujuan 6 asas yaitu tepat waktu,jumlah, jenis,tempat, mutu dan harga di Desa Labai Mandiri?